

**ABSTRAK**

Maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh *multinational corporations* (MNCs) nampaknya sudah berada dalam titik *nadhira* yang mengawatirkan. Dominasi politik global dan kekuatan modal yang dimilikinya, membuat MNCs hadir sebagai kekuatan ekonomi penting yang menggerakkan ekonomi global. Namun bagi negara-negara berkembang, kehadiran MNCs disamping mendatangkan berkah, juga rentan berpotensi menimbulkan sederet pelanggaran HAM. Bahkan MNCs secara cukup canggih selalu memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada khususnya di negara berkembang untuk kepentingan operasi bisnisnya. Menyikapi hal ini, John Ruggie mencoba mencari harmonisasi antara prinsip-prinsip HAM dengan agenda bisnis yang seringkali bertolak belakang. Untuk itu dalam *The United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights* atau disingkat UNGPs menyebutkan terdapat tiga pilar diantaranya kewajiban negara untuk melindungi, tanggungjawab perusahaan untuk menghormati, dan memperluas akses pemulihan yang efektif. Dengan demikian perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika aktivitas bisnisnya menyebabkan pelanggaran HAM. Secara mendasar konsep umum HAM tidak hanya sebatas merujuk pada perlindungan. Konsep HAM juga harus merujuk pada pemulihan bagi korban yang hak-haknya telah dilanggar, untuk itu UNGPs dalam salah satu pilarnya menyebutkan harus adanya akses pemulihan yang efektif. Untuk dapat mewujudkan hal ini UNGPs telah mengatur beberapa mekanisme yang dapat diakses masyarakat korban agar dapat mengakses pemulihan yang efektif, diantaranya *pertama*, Mekanisme berbasis non-negara atau mekanisme internal. *Kedua*, mekanisme peradilan berbasis Negara, dan *ketiga*, mekanisme non-yudisial berbasis Negara. OECD *Guidelines* merupakan salah satu mekanisme berbasis non negara yang dapat diakses oleh masyarakat korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif. Gencarnya agenda neoliberal menjadi tantangan tersendiri dari mekanisme ini untuk dapat bekerja secara efektif. Guna memperdalam persoalan ini, penulis mencoba memperkaya dengan menggunakan perspektif ekonomi-politik sembari tetap berpegang teguh terhadap sifat normatif dalam penelitian hukum.

**Kata Kunci :** Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Multinational Corporations*, Pemulihan

**ABSTRACT**

*The rise of human rights violations committed by multinational corporations (MNCs) seems to have been in the point is quite worrisome. The dominance of global politics and the power of capital it has, make MNCs present as an important economic power that drives the global economy. But for developing countries, the presence of MNCs in addition to bringing blessings, is also vulnerable to the potential to cause a series of human rights violations. Even sophisticated MNCs always take advantage of existing regulatory weaknesses especially in developing countries for the benefit of their business operations. Responding to this, John Ruggie tried to find a harmonization between the principles of human rights with a business agenda that is often contradictory. Therefore, in the United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs), there are three pillars including the obligation of the state to protect, the company's responsibility to respect, and expand access to effective remedy. Thus the company may be held accountable when its business activities lead to human rights violations. Fundamentally, the general concept of human rights is not just about referring to protection. The concept of human rights should also refer to the remedy of victims whose rights have been violated, for which UNGPs in one of its pillars says there should be effective access to remedy. In order to realize this, UNGPs has arranged several mechanisms that can be accessed by affected communities in order to access effective remedy, including first, non-state based mechanisms or internal mechanisms. Second, the state-based judicial mechanism, and thirdly, the state-based non-judicial mechanism. The OECD Guidelines are one of the non-state based mechanisms that can be accessed by affected communities for effective remedy. The onslaught of the neo-liberal agenda poses a challenge for this mechanism to work effectively. In order to deepen this issue, the author tries to enrich by using the political-economic perspective while still sticking to the normative nature of legal research.*

**Keyword :** *Human Rights Violations, Multinational Corporations, Remedy*